

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan dalam pembiayaan pemenangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Sumber pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan dalam pemenangan Pemilu Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 diseluruh karesidenan Jawa Tengah memiliki sumber dan pola pembiayaan yang sama. Pembiayaan gotong royong ini dilaksanakan setelah turunya instruksi dari Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik dan Keamanan dalam forum *Legislator Summit*. Sumber pembiayaan gotong royong yang utama diperoleh dari tiga pilar partai yakni Legislatif, Partai (DPC) dan Calon.

Ditingkat Kabupaten/Kota di-Seluruh Jawa Tengah memiliki mekanisme pembiayaan yang sama yakni dengan menggunakan sistem iuran gotong royong dalam jumlah yang tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota yang melaksanakan gotong royong. Pembiayaan gotong royong ini tidak wajib dan tidak bersifat mengikat untuk seluruh kader PDI Perjuangan, dikarenakan masing-masing kader dalam kedaulatan ekonomi berbeda-beda tingkatannya.

Bentuk pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan dalam proses pemenangan Pemilu Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 memiliki kesamaan. Hal ini dijelaskan dimasing-masing Karesidenan Jawa Tengah memiliki bentuk dasar pembiayaan gotong royong berupa uang tunai (*Cash Money*). Bentuk pembiayaan yang lain berupa Seragam Saksi yang secara langsung dikelola oleh BSPN PDI Perjuangan Jawa Tengah, namun dalam pembiayaannya dilakukan secara gotong royong dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Selain seragam saksi juga terdapat bentuk pembiayaan yang berupa Alat Peraga Kampanye yang berasal dari DPD PDI Perjuangan, dimana dalam pendistribusian APK jika mengalami permasalahan terkait pembiayaan maka akan diselesaikan secara mandiri dan gotong royong diwilayah yang mengalami permasalahan. Hal ini menjelaskan bahwasanya instruksi gotong royong dilaksanakan sampai tingkat paling dasar dalam pendistribusian APK yang dilaksanakan oleh PAC hingga tingkat Ranting.

Penggunaan pembiayaan gotong royong dalam pemenangan Pemilu Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 adalah mengikuti petunjuk dan instruksi yang dikeluarkan dalam Rakerdasus di Semarang , pada tanggal 14 Februari 2018. Seluruh kader tiga pilar partai didatangkan untuk melaksanakan

konsolidasi pemenangan. Dengan melihat hasil temuan dimasing-masing karesidenan dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan pembiayaan gotong royong dimasing-masing karesidenan se-Jawa Tengah memiliki pola yang sama.

Terdapat penggunaan pembiayaan untuk melaksanakan Rakercabsus ditingkat cabang atau DPC PDI Perjuangan Kabupaten/Kota. Selain itu digunakan untuk membiayai pembekalan dan honor saksi pemilu serta pembelian seragam. Penggunaan yang lain adalah Deklarasi pemenangan Ganjar-Yasin yang dikemas berbeda-beda disetiap daerah diseluruh Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat penggunaan lain yang tidak melanggar aturan KPU.

Tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong dalam pemilukada Jawa Tengah tahun 2018 adalah untuk membiayai proses pemenangan Ganjar-Yasin secara gotong royong. Menurut hasil penelitian disemua karesidenan, tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong adalah untuk meringankan beban biaya Pemilukada yang sangat besar. Dengan pola gotong royong dalam pembiayaan Pemilukada, diharapkan proses pemenangan Ganjar-Yasin dapat berjalan dengan maksimal dengan pengeluaran biaya yang seefisien mungkin.

## 4.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pola pembiayaan gotong royong dalam pemilu di Jawa Tengah ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk PDI Perjuangan, diantaranya;

Pola pembiayaan gotong royong PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam pemenangan Ganjar-Yasin dapat dijadikan sebagai rujukan, masukan atau sumber ide baru bagi PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD PDI Perjuangan) provinsi lain diseluruh tanah air sebagai mekanisme pembiayaan pemenangan yang dilaksanakan secara gotong royong.

Forum *Legislator Summit* DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang menjadi landasan konsolidasi untuk pelaksanaan pemenangan kontestasi politik dengan pola gotong royong, hendaknya menjadi acuan paradigma baru PDI Perjuangan di daerah yang lain selain provinsi Jawa Tengah, ini dikarenakan betapa pentingnya menjaga soliditas antar anggota dalam bersinergi dan gotong royong dalam sebuah ajang kontestasi politik.

Penggunaan pembiayaan gotong royong yang diluar dokumen LPPDK hendaknya dimasukkan kedalam LPPDK sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pemilu. Hal ini sangat penting dikarenakan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pemilu adalah hal yang bisa menaikkan elektabilitas partai bahkan juga bisa menjatuhkan elektabilitas partai.

Tujuan penggunaan pembiayaan gotong royong ini hendaknya mengalami pengkajian ulang dengan menyesuaikan karakter pemilih dan perkembangan zaman. Hal ini menjadi penting karena pemilu akan selalu mengalami perubahan dalam setiap pelaksanaannya, hal ini yang harus dipikirkan sangat matang dalam penggunaan pembiayaan sehingga memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian mengenai pembiayaan pemilu hendaknya dilanjutkan atau dikomparasikan dengan partai politik yang berbeda dan agenda Pemilu yang lain, baik Pemilu Legislatif tingkat kabupaten/kota hingga ketingkat pusat. Dikarenakan dengan berjalanya waktu dan pandangan mengenai pembiayaan pemilu sangatlah menjadi hal penting khususnya bagi Parpol peserta Pemilu untuk selalu berlomba dalam mencari inovasi dan solusi pembiayaan tanpa melupakan kaidah aturan dan mekanisme pertanggungjawaban/pelaporan kepada KPU serta transparansi kepada Publik.